

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan kebijakan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi UMKM telah berjalan sesuai dengan kerangka kebijakan yang ditetapkan. Meskipun demikian, implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya optimal dan tetap menghadapi sejumlah kendala pada setiap dimensi implementasi kebijakan.

Pada dimensi komunikasi, BSN telah melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait pembinaan SNI melalui berbagai media dan kegiatan. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa kejelasan dan kedalaman informasi yang diterima UMKM masih relatif terbatas. Sebagian UMKM belum sepenuhnya memahami tahapan penerapan SNI, kewajiban setelah sertifikasi, serta konsekuensi biaya yang harus ditanggung. Kondisi ini mengindikasikan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya mampu menghubungkan kebutuhan informasi UMKM dengan tujuan kebijakan pembinaan.

Pada dimensi sumber daya, BSN secara kelembagaan telah didukung oleh regulasi, struktur organisasi, serta pembina yang kompeten. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah pembina dan keterbatasan sumber daya finansial UMKM menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan secara optimal. Situasi ini berimplikasi pada terbatasnya intensitas pendampingan serta kesiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan teknis penerapan SNI.

Pada dimensi disposisi, aparatur BSN sebagai pelaksana kebijakan memperlihatkan sikap dan komitmen yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan pembinaan SNI. Namun demikian, disposisi UMKM sebagai kelompok sasaran masih bervariasi. Sebagian UMKM menunjukkan sikap yang positif terhadap penerapan SNI, sedangkan sebagian lainnya masih menunjukkan keraguan akibat keterbatasan kesiapan serta persepsi bahwa manfaatnya belum dirasakan secara langsung.

Pada dimensi struktur birokrasi, BSN telah menetapkan struktur dan prosedur

yang jelas dalam pelaksanaan pembinaan serta sertifikasi SNI. Namun demikian, dari sudut pandang UMKM, prosedur yang mencakup berbagai tahapan dan melibatkan banyak aktor masih dianggap kompleks dan membutuhkan pendampingan yang intensif. Kompleksitas birokrasi ini berpotensi mengurangi efektivitas implementasi kebijakan apabila tidak disertai dengan koordinasi yang baik dan penyederhanaan prosedur.

Secara penuh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan penerapan SNI bagi UMKM tidak semata-mata bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, disposisi pelaksana dan kelompok sasaran, serta kemampuan struktur birokrasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di lapangan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dan pihak-pihak terkait.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian implementasi kebijakan publik, terutama dalam konteks kebijakan pembinaan UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model implementasi kebijakan Edward III tetap relevan untuk menganalisis kebijakan pembinaan, meskipun perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih kontekstual sesuai dengan karakteristik UMKM sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Secara praktis, bagi Badan Standardisasi Nasional, disarankan untuk memperkuat kualitas komunikasi kebijakan dengan menyampaikan informasi pembinaan SNI secara lebih jelas, komprehensif, dan disesuaikan dengan kapasitas pemahaman UMKM. Selain itu, penguatan sumber daya melalui penambahan jumlah pembina, peningkatan kompetensi pendamping, serta perluasan dukungan pembiayaan sertifikasi SNI perlu menjadi perhatian guna meningkatkan efektivitas pembinaan.

BSN juga diharapkan mampu merumuskan strategi guna memperkuat

disposisi UMKM terhadap penerapan SNI, misalnya melalui pendekatan persuasif, pemberian insentif, serta penyebaran praktik baik dari UMKM yang telah berhasil mengadopsi SNI. Dari aspek struktur birokrasi, penyederhanaan prosedur dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait menjadi langkah strategis untuk mempermudah UMKM dalam proses penerapan dan sertifikasi SNI.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas penelitian ini dengan melibatkan cakupan wilayah dan ragam jenis UMKM yang lebih bervariasi, serta menerapkan pendekatan metode campuran guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai implementasi kebijakan pembinaan penerapan SNI di Indonesia.

